

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arbas, Cakra. *Jalan Terjal Calon Independen pada Pemilukada di Provinsi Aceh*. (Jakarta: Sofmedia, 2012).
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
- Asshiddiqie, Jimly et al. *Putusan Monumental, Menjawab Problematika Kenegaraan*. (Malang: Kerja Sama Setara Press dengan Forum Kajian Yurisprudensi, 2016).
- Attamimi, A. Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Disertasi. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1990).
- Barak, Aharon. *The Judge in a Democracy*. (New Jersey: Princeton University Press, 2008).
- Chad Vickery (ed.). *Pedoman untuk Memahami, Menangani, dan Menyelesaikan Sengketa Pemilu*. (International Foundation for Electoral Systems, 2011).
- Chen, Albert H. Y. *The Interpretation of the Basic Law-Common Law and Mainland Chinese Perspectives*. (Hong Kong: Hong Kong Journal Ltd., 2000).
- Friedmen, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (A Legal System a Social Science Perspective)*, diterjemahkan oleh M. Khozim. (Bandung: Nusa Media, 2009).
- H.R., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2013).
- Huda, Ni'matul. *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. (Jakarta: Rajawali Press, 2008).
- Isra, Saldi et al. *Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berfikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif)*. (Padang dan Jakarta: Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).

- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*, (New Jersey: The Lawbook Exchange Ltd, 2007).
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. (New York: Russell & Russell, 1961).
- Kelsen, Hans. *Pengantar Teori Hukum*. (Bandung: Nusa Media, 2012).
- Lamintang, P.A.F. dan C. Djisman Samosir. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*. (Bandung: TARSITO Bandung, 2010).
- Lotulung, Paulus Effendi. *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2013).
- Manan, Bagir dan Susi Dwi Harijanti. *Memahami Makna Konstitusi: Makna Aktualisasi dan Aktualisasi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. *Penemuan Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010).
- Nasution, Adnan Buyung. *Demokrasi Konstitusional: Pikiran dan Gagasan*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- Nawiasky, Hans. *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*. (Einsiedeln/Zurich/Koln: Benziger, 1948).
- Nurmayani. *Hukum Administrasi Daerah*. (Lampung: Universitas Lampung, 2009).
- Orozco-Henriquez, Jesus. *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA*, Terjemahan yang disunting oleh CETRO (*Centre for Electoral Reform*). (Jakarta: International IDEA, Bawaslu RI dan CETRO, 2010).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006).
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Saleh, Asri Muhammad dan Wira Atma Hajri. *Perihal Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*. (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
- Siahaan, Maruar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Edisi 2*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Sinamo, Nomensen. *Hukum Tata Negara Suatu Kajian Kritis tentang Kelembagaan Negara*. (Jakarta: Permata Aksara, 2012).
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Sungkar, Lailani. *Electoral Justice System dalam Bangunan Hukum Negara, dalam Negara Hukum yang Berkeadilan*, Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.C.L. (Bandung: Pustak Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2011).
- Suparman, Eman. *Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan*. (Jakarta: PT Fikahatin Aneska bekerjasama dengan BANI Arbitration Center, 2012).
- Syahrizal, Ahmad. *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006).
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010).
- Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UD NRI 1945. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008).
- Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UD NRI 1945. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku V Pemilihan Umum*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008).
- Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UD NRI 1945. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VI Kekuasaan Kehakiman*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008).
- Turpin, Colin dan Adam Tomkins. *British Government and the Consitution*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2007).
- Vickery, Chad (ed.). *Pedoman untuk Memahami, Menangani dan Memutus Sengketa Pemilu*. (Washington, D.C.: International Foundation for Electoral System, 2006).

- Widodo, Heru. *Hukum Acara Sengketa Pemilukada: Dinamika di Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2018).
- Winanrno, Nur Basuki. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008).
- Yamin, Muhammad. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid I*. (Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959).

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4317)*.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)*.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721)*.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836)*.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)*.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)*.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226)*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia*

- Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).*
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).*
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).*
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456).*
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493).*
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588).*
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588).*
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).*
- Mahkamah Konstitusi. *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 072-073/PUU-II/2004.*
- Mahkamah Konstitusi. *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 97/PUU-XI/2013.*

C. Jurnal

- Canon, Bradley C. "Defining the Dimensions of Judicial Activism". *Judicature*, Volume 66, Issue 6, Desember 1983.
- Faiz, Pan Mohamad. "Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016.
- Harun, Refly. "Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum". *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 1, Maret 2016.
- Lailam, Tanto. "Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945". *Jurnal Media Hukum* Vol. 21 No. 1 Juni 2014.
- Posner, Richard. "Cost-Benefit Analysis: Legal, Economic, and Philosophical Perspectives", *The Journal of Legal Studies*, Vol. 29, No. 2, 2000.
- Santoso, Topo. "Penguatan Penegakan Hukum Pemilu". *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Jurnal #2 Februari 2012, Jakarta: Perludem, 2012.

D. Internet

- Agus Sahbani. "MK Hapus Kewenangan Sengketa Pemilukada". 19 Mei 2014, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5379f071d5173/mk-hapus-kewenangan-sengketa-pemilukada>. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2018.
- Ash. "MA Sambut Baik Sengketa Pilkada Balik ke MK". 18 Februari 2015, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54e3fb84238ea/ma-sambut-baik-sengketa-pilkada-bali-k-ke-mk>. Diakses pada tanggal 29 November 2018.
- Hermawan, Ilham. "Penafsiran Konstitusi dan Identitas Tafsir Konstitusi". 28 Desember 2017, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a449a741270d/penafsiran-konstitusi-dan-identitas-tafsir-konstitusi-oleh--m-ilham-hermawan>, Diakses pada tanggal 31 Januari 2019, pada pukul 18.53 WIB.
- Mahkamah Konstitusi. "Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah/Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota". <https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPHPUD&menu=5>, Diakses pada tanggal 31 Januari 2019, pukul 19.43 WIB

E. Kamus

- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. (St. Paul, Minn: West Group, 1999).

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).